

## **TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PERSPEKTIF KINERJA PEMERINTAH DAERAH**

**Indra Kristian<sup>1)</sup>, Aulia Fitriani Rahma<sup>2)</sup>, Bayu Nugraha<sup>3)</sup>, Cinta Amalia Putri<sup>4)</sup>**

*Universitas al ghifari Bandung<sup>1)</sup>  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung<sup>2),3),4)</sup>*

Email: *technician2007@gmail.com<sup>1)</sup>, faulia857@gmail.com<sup>2)</sup>,  
lbayunugraha360@gmail.com<sup>3)</sup>, Cintaamalia905@gmail.com<sup>4)</sup>*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memaknai transparansi dan akuntabilitas yang terjadi di provinsi Jawa Barat. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja pelayanan kebijakan gubernur Jawa Barat. Pada pembahasan ini penulis akan mengurai sejumlah fenomena yang tersebut berhubungan dengan fakta transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merujuk pada studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah Jawa Barat dikaji dari pelayanan dan tata kelola pemerintahan dalam melayani masyarakat. Melalui kebijakan pemerintah gubernur Jawa Barat, masyarakat mulai merasakan kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas sehingga pejabat publik pun menerima apresiasi dan respon baik dari publik.

Kata Kunci : *Transparansi, akuntabilitas, Kinerja*

### **Abstract**

*This study aims to identify and interpret transparency and accountability in the province of West Java. The object used in this study is the performance of the West Java governor's policy service. In this discussion, the author will describe a number of phenomena that are related to the facts of transparency and accountability in West Java governance. This research uses a qualitative approach that refers to the literature study. The results showed that the transparency and accountability of the West Java government's performance were assessed from the service and governance of the government in serving the community. Through the West Java governor's government policy, the public began to feel the government's presence in providing quality services so public officials also received appreciation and good responses from the public.*

Keyword: *Transparency, Accountability, Performance.*



## A. PENDAHULUAN

Merujuk pada kacamata publik, bahwa keberhasilan dan kesejahteraan suatu negara dapat dinilai dari kualitas kinerja pelayanan publik. Oleh karena itu masyarakat berhak menentukan nilai baik dan buruknya suatu pelayanan yang diberikan oleh aparat atau aktor pejabat publik setempat. Permasalahan yang timbul biasanya disebabkan oleh ketidakefektif dan efisien suatu transparansi dan akuntabilitas dalam suatu pemerintahan. Oleh karena itu transparansi dan akuntabilitas publik harus segera direalisasikan dengan baik untuk dapat meningkatkan persaingan global berdasarkan paradigma kehidupan di zaman Revolusi 4.0 ini. Dalam kesempatan kali ini penulis memaparkan Transparansi dan Akuntabilitas publik pemerintah provinsi Jawa Barat. Dilihat berdasarkan fakta yang kami temukan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengembangkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan telah diatur berdasarkan undang-undang yang tersedia. Dan pernyataan tersebut dapat mewujudkan masyarakat Jawa Barat merasakan adanya bentuk pelayanan dari aparat pemerintahan provinsi Jawa Barat. Lalu apa yang pemerintah dapatkan atas pelaksanaan pelayanan yang telah dikembangkan pada masyarakat Jawa Barat? Hal tersebut yang membuat pembaca pastinya bertanya-tanya, untuk itu mari kita lihat sebuah bentuk pelayanan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap daerah provinsi Jawa Barat.

## B. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian Hermanson (2003) mengenai hubungan antara penerapan *good governance* dengan kinerja organisasi menyatakan bahwa penerapan *good governance* berasosiasi dengan kinerja organisasi. Dari hasil penelitian Hermanson tersebut, secara logis dapat dirumuskan kerangka berpikir bahwa pemerintahan akan sangat terbantu kinerjanya apabila tata kelola pemerintahan tersebut merupakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dimensi dari *good governance* yang memiliki keterkaitan erat dengan aspek akuntansi adalah transparansi dan akuntabilitas. Pada aspek transparansi, secara logis apabila informasi-informasi yang menjadi hak publik disampaikan oleh pemerintah secara transparan, akan menimbulkan suatu kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah sehingga pada akhirnya akan mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik. Pada aspek akuntabilitas, secara logis apabila akuntabilitas pejabat publik terhadap masyarakat diterapkan dengan baik oleh pemerintah kepada masyarakat, maka akan memunculkan suatu kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap pemerintah sehingga masyarakat akan menilai baik terhadap kinerja pemerintahan. Dengan transparansi dan akuntabilitas yang baik, keadilan pada pelayanan publik dapat dicapai. Keadilan bisa diwujudkan apabila ada aturan yang disampaikan secara transparan dan hasil pelaksanaan yang disampaikan kepada masyarakat secara jelas sehingga masyarakat akan dapat membandingkan kualitas pelayanan yang diterimanya terhadap orang lain. Keterwujudan transparansi, akuntabilitas dan keadilan pemerintah pada akhirnya akan dapat memberikan input pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat akan mempersepsikan bahwa kinerja pemerintah adalah baik.

Lalolo (2003) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Mustopa Didjaja (2003) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan

akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Sedangkan menurut Kristianten (2006), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Sabeni dan Ghozali (2001) menyatakan “Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan”. Mardiasmo (2002) mengatakan ”Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Menurut Nordiawan (2006) mengatakan ”Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”.

### C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Ini merupakan jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial (Creswell, 2016). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lainlain. Salah satu alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti dimana metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan suatu yang sulit untuk dipahami. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program (Creswell, 2016). Analisis data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan membandingkan berbagai sumber pustaka serta mengimpretasikan hasil analisis, sehingga dapat menjawab semua permasalahan. Tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan yang telah terjawab.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi dan akuntabilitas memiliki keterkaitan satu sama lain. Transparansi menunjuk pada kebebasan memperoleh informasi. Akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Senada dengan pengertian dari (UNDP), Transparansi sendiri memiliki arti keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran. transparansi adalah sistem informasi yang dikembangkan sehingga memungkinkan masyarakat dapat mengakses berbagai informasi mengenai pelayanan publik. Sedangkan akuntabilitas adalah standard dan prosedur yang digunakan oleh pemerintah untuk mempertanggungjawaban tindakannya kepada pemilik mandat atau rakyat. Dalam konteks ini, jika suatu subyek telah transparan, maka hal itu perlu dipertanggungjawaban dengan baik sehingga diperoleh suatu kejelasan dan tidak kegaruan. transparansi memiliki peran penting dalam pengembangan akuntabilitas publik karena dengan mewujudkan transparansi maka pemerintah setidaknya telah mempermudah warga untuk mengetahui tindakannya, rasionalitas dari tindakan itu, serta membandingkannya dengan sistem nilai yang ada., tanpa transparansi maka tidak akan ada akuntabilitas publik. Transparansi setidaknya memiliki tiga aspek kritis:

- 1) berkaitan dengan ketersediaan informasi (*Availability Of Information*)
- 2) kejelasan peran dan tanggung jawab di antara lembaga yang merupakan bagian dari proses-proses yang diperlukan transparansinya; dan
- 3) sistem dan kapasitas dibalik produksi itu serta jaminan informasi yang tersistemik itu.

Ketiga aspek kritis ini saling memiliki keterkaitan, karena ketersediaan sistem informasi saja tidak cukup kalau tidak ada penjelasan tentang peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga yang terlibat dalam berbagai proses yang berlangsung/terjadi, di mana semua itu harus dijamin berdasarkan sebuah sistem yang pasti.

### ***E-Government* sebagai salah satu fasilitas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jawa Barat**

*E-Government* merupakan upaya pemerintah untuk mendekatkan diri pada masyarakat. Hal ini sejalan dengan jiwa desentralisasi dimana pemerintah pusat telah menyerahkan beberapa kewenangan kepada pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan umum. Pelayanan umum yang selama ini bermasalah misalnya dengan kelambatannya, ketidaktransparanannya, kesulitan untuk diakses masyarakatnya, dicoba untuk dipecahkan dengan menggunakan teknologi berbasis elektronik ini. *E- Government* merupakan program pemerintah 374 dalam upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik serta melakukan transformasi guna memfasilitasi kegiatan masyarakat dan kalangan bisnis untuk mewujudkan perekonomian berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*). Selain itu, menurut Indrajit (2007), pada dasarnya implementasi konsep eGovernment merupakan sebuah tantangan transformasi. Fungsi teknologi informasi di dalam kerangka ini adalah tidak sekedar sebagai penunjang manajemen pemerintahan yang ada, tetapi justru merupakan driver of change atau sebagai hal yang justru menawarkan terjadinya perubahan-perubahan mendasar sehubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan di era modern. Contoh penerapan *E-Government* di Jawa Barat Pikobar Solusi Digital Andalan Jawa Barat Untuk Covid-19 sejak ditemukan kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada 2

Maret 2020 oleh warga Depok, Jawa Barat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat langsung memberlakukan status siaga dan membentuk Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat (Pikobar). Dipusatkan di Jabar Command Center, Gedung Sate, Kota Bandung, Pikobar dikembangkan dengan berbagai aplikasi digital untuk penanganan Covid 19, termasuk data dan informasi rumah sakit, peta penyebaran, hingga layanan bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi ini. Aplikasi Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar) menjadi salah satu inovasi digital yang kita unggulkan karena memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Jabar di tengah pandemi Covid-19. Berbagai data dan informasi terkait covid-19 bisa dengan mudah diakses masyarakat melalui perangkat digital. Bahkan aplikasinya juga terus dikembangkan ke berbagai layanan. Termasuk data informasi untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengetahui tentang Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah selama pandemi ini melalui fitur SOLIDARITAS (Sistem Online Data Penerima Bantuan Sosial). Aplikasi PIKOBAR ini dirancang dengan semangat open source untuk bisa terus dikembangkan.

### **Bentuk pelayanan sistem informasi manajemen dalam penanganan pelayanan prima**

Memberikan pelayanan publik yang prima merupakan tujuan setiap pemerintah daerah. Pemerintah daerah saat ini berlomba-lomba menerapkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk dapat membantu mewujudkannya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas yang saling berkaitan yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, dan sistem manajemen. Perkembangan teknologi informasi serta penerapan konektivitas internet ke dalam tata kelola pemerintah diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan melalui peningkatan efisiensi, inovasi, produktivitas, perluasan jangkauan dan penghematan biaya.

Pelayanan publik yang prima bukan sekedar mengikuti trend global, melainkan diarahkan untuk mewujudkan good governance, yakni tata pemerintahan yang baik, transparansi serta akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Penerapan teknologi informasi juga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang efektif serta efisien terhadap masyarakat, tentu ini merupakan langkah yang strategis. Namun dalam penerapannya tentu tidak semudah mebalikkan telapak tangan, perlu proses, waktu, dan tahapan yang berkesinambungan. Penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik juga memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan daerah. Dimana daerah dapat menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelayanan, memperkenalkan potensi daerah, serta meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan bisnis. Salah satu contoh penerapan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik adalah dengan menggunakan Aplikasi mCity Indonesia. Aplikasi mCity Indonesia merupakan sebuah aplikasi berbasis mobile yang dapat digunakan sebagai media informasi dan pusat layanan publik daerah.

#### **Aplikasi mCity**

Informasi dan layanan yang tersedia dalam Aplikasi mCity antara lain: informasi wisata, kuliner, hotel, fasilitas umum, katalog UMKM, serta mencakup layanan publik seperti informasi perizinan, epajak, Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), aspirasi, harga pangan, Flight Information Detail System (FIDS), dan layanan unggulan daerah lainnya. mCity juga memiliki fitur-fitur yang interaktif, seperti streaming CCTV, Location Based Augmented Reality (AR), dan Virtual Reality (VR). Dengan kelengkapan informasi dan

layanan yang dimiliki mCity, kami berharap semua informasi dan layanan publik daerah dapat terangkum dan terintegrasi dalam satu genggamannya yaitu Aplikasi mCity.

### **Peran Ideal Organisasi Perangkat Guna Mengutik Aspek Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Jawa Barat**

Menurut Rasyid (1997), pemerintah mempunyai tiga fungsi hakiki yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Pendapat ini memberikan kesan bahwa peran pemerintah tersebut hanya cocok diterapkan pada masyarakat di Negara berkembang yang tingkat pemberdayaan masyarakatnya masih rendah sehingga ketergantungannya kepada pemerintah masih tinggi. Paradigma baru pemerintahan seperti yang dijelaskan oleh Osborne dan Gaebler (1992) bahwa pemerintahan yang dulunya berperan langsung sebagai penyedia pelayanan publik (*rowing*) dan terlibat dalam kegiatan yang bersifat teknis operasional untuk pemenuhan kebutuhan publik, akan bergeser perannya pada fungsi mengarahkan (*steering*). Fungsi ini mengharuskan pemerintah untuk dapat lebih memberdayakan (*empowering*) masyarakat dengan mendorong tumbuhnya partisipasi dalam menyediakan pelayanan publik. Tugas birokrasi pemerintahan yang utama adalah menyelenggarakan pelayanan kepada rakyat selama masyarakat belum mampu menyelenggarakan urusan atau kebutuhannya secara mandiri. Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan keperluan itu sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan.

Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).<sup>4</sup>Mintzberg (1989) menjelaskan bahwa dalam kelembagaan dibagi menjadi 5 elemen yang memiliki peran dan fungsi masing-masing. Kepala daerah yang juga merupakan bagian dalam organisasi yang dijabarkan oleh Mintzberg berperan sebagai *Strategic apex* yang berfungsi untuk menjaga kelangsungan organisasi agar mampu berperan untuk mencapai misi yang sudah ditetapkan. Dalam usahanya untuk melaksanakan misi tersebut, kepala daerah juga berwenang untuk mengatur pola kelembagaan dan juga komposisinya sesuai dengan aturan yang berlaku dan kebutuhan. Pengaturan tersebut juga harus tetap memperhatikan asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, renang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas.

*Operating core* adalah para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi dan jasa. Peran *Operating Core* didalam kelembagaan dilaksanakan oleh Dinasdinas yang ada dengan tugas dan fungsi yang berbeda sesuai dengan aspek dan bidang yang harus ditangani. Pembagian aspek dan bidang tersebut diterapkan dengan prinsip efisiensi dan efektifitas, serta pertimbangan pembagian habis tugas. Jangkauan kerja, tata kelola, dan juga fleksibilitas menjadi poin penting yang juga digunakan sebagai bahan pertimbangan pembentukan atau pembaharuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

## **Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Prima**

Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali meraih predikat A pada hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2019 yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. SAKIP dengan predikat sangat memuaskan ini yang ketiga kali berturut-turut diperoleh Pemda Prov Jabar. Sebelumnya, Jabar meraih predikat A pada SAKIP 2017 dan 2018. Capaian ini menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran dibandingkan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintah berorientasi hasil, sangat memuaskan. Jawa Barat menjadi satu-satunya provinsi di Wilayah I Indonesia yang mendapatkan penghargaan tertinggi dalam hal kinerja akuntabilitas dan kinerja pemerintahan 2019. Wilayah I terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat.

Selain mendapat predikat A untuk tingkat provinsi, 21 kota dan kabupaten di Jabar mendapatkan predikat B. Masing-masing Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kota Cimahi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kota Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Kota Banjar, Kota Cirebon, Kota Depok, dan Kabupaten Sumedang. Sedangkan enam daerah lainnya mendapatkan predikat BB, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kota Bogor, Kota Tasikmalaya, Kota Sukabumi, dan Kota Bandung.

## **Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Pada Beberapa Kota di Provinsi Jawa Barat**

Atas massifnya penyebaran virus Corona, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengambil langkah preventif untuk memutus rantai penularan Corona. Salah satunya adalah dengan menerapkan kerja dari rumah atau *Work From Home* (WFH). Kebijakan ini menyusul penetapan WHO yang menyebut Covid-19 sebagai pandemi global. Untuk Indonesia, pemerintah telah membuat kebijakan social distancing yang diberi nama PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). PSBB ini dibuat berbasis pada PP No. 21/2020 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Maret 2020. PSBB adalah pendekatan yang ada dalam UU No. 6/2018 tentang Karantina Kesehatan. Secara teknis, PSBB ini diatur dalam Permenkes No. 9/2020 dan Permenhub No. 18/2020.

Dalam penerapannya, setiap daerah bisa membuat peraturan Gubernur yang mengatur pelaksanaan teknis di tingkat daerah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sebagai contoh, setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat, mengeluarkan Pergub No. 27/2020 tentang Pedoman PSBB dalam Penanganan covid-19 di lima kabupaten/kota dalam Provinsi Jawa Barat. Meskipun terkesan agak terlambat, kebijakan ini menjadi payung hukum yang mengikat semua orang yang berada di dalam wilayah penerapan PSBB. Namun demikian, PSBB cenderung lebih longgar dibandingkan dengan pendekatan lockdown yang dilakukan oleh sejumlah negara. Namun demikian, apapun pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam penanganan covid-19 di Indonesia, semua pihak berharap, pendekatan ini juga harus memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik (khususnya aspek akuntabilitas) di satu sisi dan adanya partisipasi publik yang berkualitas dan otentik di sisi lain. Akuntabilitas

dalam penanganan covid-19 menjadi penting diperhatikan oleh pemerintah dan semua pihak. Meskipun penanganan covid-19 merupakan bagian dari penanganan darurat, perlu untuk diperhatikan aspek-aspek dalam tata kelola, harus tetap menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan efektivitas keberhasilan dalam pelaksanaannya di satu sisi dan mengurangi dampak negatif di sisi lain. Semakin akuntabel proses penanganan covid-19, hasil yang diharapkan akan semakin baik bagi pemerintah dan semua pihak.

### **Penerapan akuntansi keuangan daerah guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas fiskal di provinsi jawa barat**

Berdasarkan fakta yang kami temukan bahwa analisis keuangan daerah provinsi jawa barat mengacu pada data laporan realisasi anggaran provinsi jawa barat dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil analisis laju pertumbuhan keuangan, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas pendapatan, rasio efisiensi pendapatan, dan rasio keserasian. Dari aspek-aspek tersebut pemerintah provinsi jawa barat memaparkan bahwa transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan saat ini tercatat pada angka stabilitas keuangan daerah mencapai 84% dengan rentang kategori sangat baik. Adapun faktor yang menghasilkan angka tersebut diantaranya Pertama pada pembagian tugas dan wewenang dilakukan dengan baik sehingga fungsi dan wewenang dengan posisi jabatan yang diemban sudah terlaksana dengan baik, Kedua adanya ketersediaan sistem informasi bagi publik Dalam pelaksanaannya instansi-instansi pemerintah khususnya Biro Keuangan SETDA memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi, Ketiga berupa sistem anggaran terbuka bagi masyarakat, Keempat adanya lembaga independen yang mengawasi jalannya pemerintahan.

### **Apresiasi pemerintah provinsi jawa barat atas pencapaian dalam menangani dan merealisasikan kebijakan publik**

Dalam merealisasikan program pelayanan masyarakat, pemerintah provinsi jawa barat telah berhasil atas pencapaian yang dilakukan. Masyarakat merasakan hadirnya peran pemerintah dalam hal ini salah satunya terjadi pada tahun 2018, pelayanan yang diberikan berupa keterbukaan akses informasi di berbagai jaringan sehingga kalangan mayoritas dapat menemukan berbagai informasi yang memuat di web provinsi jawa barat. Tingkat apresiasi masyarakat terhadap media website Pemerintah provinsi Jawa barat mengacu pada aspek intensitas mengakses, ketertarikan konten, dan transparansi informasi dalam perspektif keterbukaan informasi publik yang cukup tinggi, serta tidak berbanding lurus dengan predikatnya sebagai website terbaik se-Indonesia oleh PeGI Kemenkominfo. Pandangan masyarakat terhadap pengelola website resmi pemerintah berdasarkan aspek kualitas informasi yang disajikan, tampilan, dan interaksi antara masyarakat dengan pemerintah atau stakeholders lainnya mendapat apresiasi tinggi. Selain itu Keterpaduan sistem e-Government dalam rangka penyampaian dan pemanfaatan website yang apresiatif dari masyarakat, Kemenkominfo telah berkoordinasi secara sinergi dengan terkoordinasi dengan Dinas Kominfo dalam mengelola website resmi pemerintah daerah dengan memberikan penataan dan bimbingan konsep KIP secara 47 periodik, baik berbentuk perangkat keras (hardware) maupun lunak (software) yang diperlukan.

## **Transparansi Tata Kelola Pemerintah Jawa Barat dalam Menanggulangi Angka Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan serta dapat diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Sedangkan kemiskinan di suatu daerah adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kondisi yang ada pada suatu kemiskinan adalah hal yang tidak diinginkan bahkan harus diselesaikan guna terciptanya suatu daerah dengan kondisi yang aman, damai dan sejahtera. Mengutip kalimat kemiskinan, pemerintah republik indonesia khususnya yang terjadi di daerah provinsi jawa barat Ridwan Kamil selaku Gubernur harus memiliki solusi dalam mengotomatisasi dan tata kelola masyarakat jawa barat dalam menanggulangi kemiskinan. Pemikiran terkini mengenai pengentasan penanggulangan kemiskinan dan tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa keduanya saling berkaitan satu sama lain. Tata kelola pemerintahan yang buruk membuat upaya pengentasan penanggulangan kemiskinan tidak berhasil.

Pada tanggal 28 September 2021 Bapak ridwan kamil menghadiri rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dari Sisi Pemberdayaan Ekonomi yang dipimpin Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin melalui konferensi video dari Gedung Pakuan, Kota Bandung. pada pertemuan tersebut wakil presiden RI mengatakan, ada dua tantangan untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Pertama, memastikan program perlindungan sosial. Kedua adalah menyelenggarakan program pemberdayaan bagi masyarakat kelompok miskin ekstrem. Guna memastikan dua hal tersebut berjalan optimal maka semua jajaran kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, dan pihak non-pemerintah bersangkutan mesti memastikan program tepat sasaran. Dari pertemuan rapat tersebut, ridwan kamil selaku gubernur provinsi jawa barat mempunyai berbagai solusi untuk menanggulangi angka kemiskinan di jawa barat seperti menurunkan beban pendapatan masyarakat seperti sekolah gratis dan kesehatan gratis, menekan angka kemiskinan dengan rutin dan meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan usaha.

Mengacu pada batasan garis kemiskinan yang digunakan BPS tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat tercatat pada 48,27 juta jiwa atau lebih dari 17 persen dari total penduduk yang mencapai 270,2 juta jiwa. Dalam menangani hal kemiskinan maka pemerintah hendak menyusun berbagai program penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Upaya Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk membebaskan dan melindungi masyarakat dari kemiskinan dengan tujuan mengatasi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan membuat masyarakat miskin berpartisipasi sepenuhnya dalam proses pembangunan.

Dalam merealisasikan program penanggulangan kemiskinan, pemerintah Jawa Barat telah mampu mengaplikasikan salah satu program yang terdapat di salah satu kota di jawa barat yaitu Kota Bandung dengan program "Program Hibah Bansos Online Sabilulungan" program ini bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memonitor penyaluran hibah bansos yang sudah disetujui oleh Pemerintah Kota Bandung

sehingga dapat turut memberikan masukan dan saran terkait hibah bansos tersebut, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Hibah Bansos Online sabilulungan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyaluran hibah dan bansos adalah yang pertama di Indonesia yang merubah paradigma dan pandangan masyarakat Kota Bandung terkait pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial yang sebelumnya dilakukan secara manual dan tertutup menjadi terbuka, transparan dan akuntabel. Seluruh tahapan proses mulai proses penganggaran sampai dengan pencairan dana di Bank, Alamat Penerima Hibah dan Bansos, Foto Penerima Hibah dan Bansos, Besaran uang yang diterima, Rincian Penggunaan Uang, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Peraturan Walikota tentang rincian penggunaan bantuan sosial divisualisasikan secara online melalui [www.sabilulungan.bandung.go.id](http://www.sabilulungan.bandung.go.id). Masyarakat dapat melihat secara online setiap saat data penerima hibah dan bantuan sosial dan berkesempatan turun ke lapangan menyaksikan proses kegiatan yang dilaksanakan penerima hibah dan bantuan sosial serta membandingkan antara input (dana) yang diterima dengan output yang dihasilkan. Hibah Bansos Online memberikan solusi bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota lain di Indonesia yang memiliki permasalahan sama dengan Pemerintah Kota Bandung terkait dengan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial.

## E.SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan berupa:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari diraihnya predikat A pada hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tiga tahun berturut-turut. Hal tersebut juga senada dengan masyarakat yang memberikan apresiasi tinggi kepada Pemprov Jawa Barat.
2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan cara melakukan transformasi pelayanan ke dalam bentuk digital atau e-Government. Hal tersebut dilakukan guna mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas Pemprov Jawa Barat.
3. Transparansi dan Akuntabilitas merupakan hal penting yang harus dimiliki instansi Pemerintah, hal ini dikarenakan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Apabila akuntabilitas dan transparansi ditingkatkan pelaksanaannya maka akan meningkatkan kinerja instansi Pemerintah dan juga kepuasan masyarakat.

Meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan jurnal ini dan masih banyak kekurangan yang perlu penulis perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan penulis. Dengan ini kami membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya.

## REFERENSI

- Anwar, M., Jatmiko, B., (2014). Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Transparan dan Akuntabel (Survey pada Perangkat Desa di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta), Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung, (2015), *Kota Bandung Dalam Angka*, BPS Kota Bandung. Bandung.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2015). Profil Kota Bandung Tahun 2015 Blaxall, John, 2000, *Governance and Poverty in Mongolia*, Washington DC: The World Bank.
- Engkus, E. (2017). Administrasi Publik Dalam Perspektif Ekologi. *JISPO : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(1), 91-101.
- Ishak, D., Maolani, D. Y., & Engkus, E. (2017). Konsep Kinerja Dalam Studi Organisasi Publik. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 101-120.
- Hariyoko, Y., Puspaningtyas, A., (2017), Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang, Jurnal Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.
- Harimurti, A., (2007), Kumpulan Karya Ilmiah Peneliti IX : Peningkatan Peran SDM Peneliti Komunikasi Dan Informatika Dalam Mendukung Masyarakat Informasi, Badan Litbang SDM. Jakarta.
- Mintzberg, Henry, (1989), *Mintzberg on Management, Inside Our Strange World of organizations*.
- Pamungkas, Wisnu W., (2020), Pemerintah Provinsi Jabar Raih Hattrick SAKIP A Republik Indonesia, (2005), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Saifullah, (2014), Tipe Relasi situs E- Government di Jawa Barat dan Daerah Lainnya.
- Sangki, Adiarto A., Gosal, R., Kairupan, J., (2017), Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolang Mongondow), Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Santoso, P., (2010), Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud, Jurnal Universitas Parahyangan.
- Sujarweni, W., (2015), *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Penerbit Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Sufianti, E., (2020), *Aplikasi EGovernment Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Beberapa Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Di Indonesia*, Jurnal STIALAN Bandung, Bandung.
- Sugiyono, (2012), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Syamsul, (2017), *Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Bukti Empiris pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia*, Tesis Magister Sains Akuntansi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Zulaeha, S., (2020), *Perlunya Akuntabilitas Kinerja Penanganan Covid-19*.